



DINAS TPHP  
KAB. MAGETAN

# RENCANA STRATEGIS

## TAHUN 2024 - 2026



DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN MAGETAN

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 ini dapat diselesaikan menurut perundangan yang berlaku. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 - 2026 ini menjabarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan 2024 - 2026 untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan perumusan indikator kinerja baik indikator kinerja OPD, indikator kinerja program maupun sub kegiatan. Indikator kinerja yang terukur akan memudahkan kita dalam melakukan evaluasi secara periodik.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan guna mencapai tujuan dan sasaran kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Magetan, 2023  
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA PERKEBUNAN  
DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN MAGETAN



**Ir. USWATUL CHASANAH, MMA**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19660904 199602 2 001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL .....	3
DAFTAR GAMBAR .....	4
DAFTAR LAMPIRAN .....	5
BAB I. PENDAHULUAN.....	6
Latar Belakang .....	6
Landasan Hukum .....	7
Maksud dan Tujuan .....	10
Sistematika Penulisan .....	10
BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
Tugas, Fungsi, dan Struktur PD.....	14
Sumber Daya Perangkat Daerah .....	19
Tantangan dan Peluang .....	46
BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah.....	49
Permasalahan Pelayanan PD .....	49
Isu-Isu Strategis .....	62
BAB IV. Tujuan dan Sasaran.....	64
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah .....	64
BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan.....	68
Strategi dan Arah Kebijakan .....	68
BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan.....	70
Rencana Program .....	70
Rencana Kegiatan.....	70
BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan.....	81
Rencana Program .....	81
BAB VIII.	
Penutup.....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang
Tabel 2.2	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon
Tabel 2.3	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.4	Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan
Tabel 2.5	Asset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
Tabel 2.6	Keragaan Aset Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
Tabel T-C.24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran RPD Kab Magetan 2024-2026
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Pertanian
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur
Tabel 3.5	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magetan
Tabel 3.6	. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magetan
Tabel 3.7	Hasil Telaahan Tata Ruang Wilayah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan terhadap RTRW Kabupaten Magetan
Tabel T-C.25.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel T-C.26.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tabel T-C.27.	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-202
Tabel T-C.28.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TAHUN 2024-2026

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan	18
Gambar II.2	Luas Lahan Sawah di Kabupaten Magetan, tahun 2018 – 2022	46

## DAFTAR LAMPIRAN



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis yang kemudian disingkat (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berisikan visi, misi, dan nilai-nilai instansi, lingkungan strategis, dan faktor-faktor penentu keberhasilan, serta tujuan, sasaran, dan cara mencapainya. Renstra akan menjadi pedoman, arah, dan tujuan yang jelas bagi usulan perencanaan program dan kegiatan untuk masa lima tahun mendatang. Menteri dalam Negeri melalui instruksi Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru telah mengeluarkan arahan untuk melakukan penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 050/4036/403.202/2022 telah menetapkan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026. Dalam penyusunan Renstra 2024-2026 ini kondisi Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Magetan pada khususnya masih berjuang untuk pulih dan bangkit dari keterpurukan akibat dampak Pandemi Covid-19. Karena itu kebijakan pembangunan pertanian di Magetan masih fokus pada pembangkitan ekonomi masyarakat. Prioritas program dan kegiatan serta pendanaan akan diprioritaskan pada percepatan pemulihan dan kebangkitan sektor pertanian yang menjadi salah satu sektor basis di Kabupaten Magetan.

Renstra disusun sebagai pedoman bagi penetapan yang dibutuhkan sesuai dengan tahapan pembangunan. Renstra juga berfungsi sebagai acuan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dalam

merencanakan program dan kegiatan tahunan selama 3 tahun ke depan yaitu tahun 2024-2026. Renstra ini akan selalu disempurnakan sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis, kebutuhan pembangunan pertanian dan perkembangan kapasitas pengelolaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Dalam hal ini, RPD Kabupaten Magetan tahun 2024-2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah 2024-2026. Selanjutnya Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 3 (tiga) tahunan yang berkesinambungan.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam perencanaan strategis, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah pada masa transisi pemerintahan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini mengacu ada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan disusun dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sehingga dapat mendukung atas sasaran strategis yang ditetapkan dalam RPD Daerah. Wewenang dinas dalam bidang pertanian menjadi sangat strategis karena menjadi salah satu prioritas sektor pembangunan daerah yang harus segera dipulihkan.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mendukung Tujuan I yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sistem Ekonomi Kerakyatan dengan Indikator Angka Pertumbuhan Ekonomi. Sedangkan, untuk sasarnya, Renstra dinas merujuk pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan Kabupaten Magetan yang salah satu indikatornya adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Persentase PDRB Sektor Pertanian. Maka, orientasi dan fokus target kinerja dinas adalah meningkatkan kesejahteraan petani yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat. Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan menyusun dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

- 12) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 13) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; yang kemudian disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 18) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- 19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 No. 1 seri E);
- 20) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten agetan Tahun 2009 Nomor 8);
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

- 23) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
- 24) Peraturan Bupati Magetan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
- 25) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan tahunan dinas, pedoman bagi sekretariat, dan bidang-bidang dalam merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis pemerintah daerah dan dinas Tahun 2024 – 2026. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan antara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama 3 (tiga) tahun mendatang
2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Kabupaten Magetan.
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 3 tahun;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun tiga tahunan ini.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

### 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

#### 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Bagian ini mengemukakan kelompok sasaran pelayanan yang menjadi mitra perangkat daerah, antara lain Bappeda sebagai perencana, kelompok tani sebagai binaan dinas.

### BAB III.PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

#### 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

#### 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

mengemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

#### 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya diperoleh informasi tentang isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

### BAB IV.TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan relevansi dan konsistensi antar Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dengan tujuan dan sasaran Perangkat daerah. Tujuan dan Sasaran perangkat daerah harus memiliki dukungan terhadap pencapaian sasaran pemerintah daerah.

### BAB V.STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Perangkat Daerah dalam mencapai sasaran tahun 2024-2026.

#### BAB VI.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Menguraikan rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.

#### BAB VII.KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu oleh perangkat daerah tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

#### BAB VIII.PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan aturan peralihan perencanaan pembangunan



## BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur PD

Semenjak ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang nomenklatur OPD yang baru maka nama OPD berubah menjadi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Berdasarkan peraturan tersebut Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah OPD dengan Tipe B dan mengampu urusan pertanian. Adanya perubahan Nomenklatur OPD belum diikuti dengan adanya Peraturan Bupati mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja. Oleh karena itu pada Renstra ini masih menggunakan SOTK yang lama. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan nomor 85 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan terdiri dari:

#### A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dalam merumuskan perencanaan kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang Pertanian.

#### B. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### C. BIDANG SARANA PRASARANA

Bidang sarana prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana;
- 2) penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- 3) pengembangan potensi dan pengelolaan lahan irigasi pertanian;
- 4) penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
- 5) pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- 6) pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- 7) pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG TANAMAN PANGAN mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

Fungsi:

- 1) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- 2) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- 3) pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan;
- 4) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- 5) pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- 6) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- 7) pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

E. BIDANG HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan.

Fungsi

- 1) penyusunan kebijakan perbenihan, produksi dan pengolahan di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 2) perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura dan perkebunan;

- 3) pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 4) pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 5) pemberian bimbingan pascapanen dan pengolahan hasil hortikultura dan perkebunan;
- 6) pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura dan perkebunan;
- 7) pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura dan perkebunan; dan
- 8) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. BIDANG KETAHANAN PANGAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

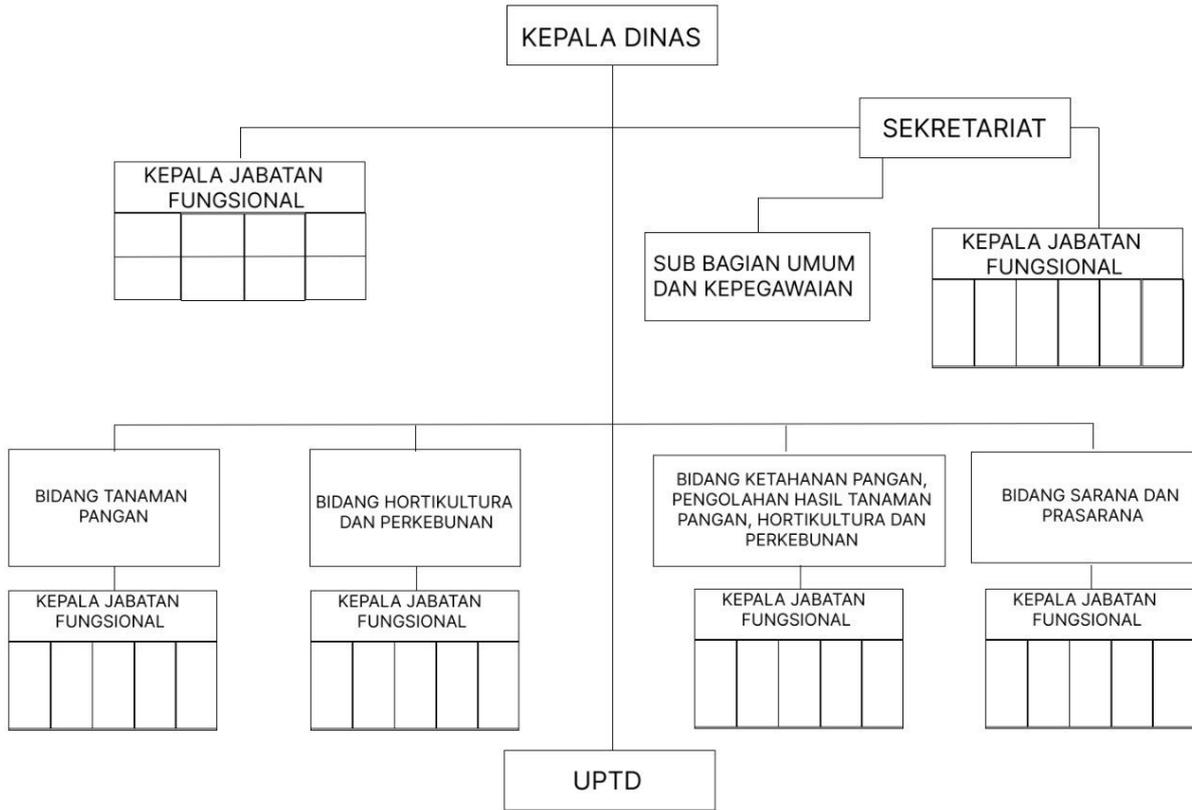
Fungsi:

- 1) penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 2) penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 3) penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- 5) penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- 6) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 7) penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
  - 8) penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
  - 9) penyiapan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
  - 10) penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - 11) penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
  - 12) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- G. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai tugas melaksanakan produksi dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul serta pengelolaan aset Pemerintah Daerah untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- H. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan pertanian dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian.

**Gambar 2.1**

**Bagan Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan  
Kabupaten Magetan**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan tahun 2022, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan memiliki 178 pegawai yang terdiri dari ASN dan Non ASN.

**Tabel 2.1. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang**

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/e	-
2.	IV/d	-
3.	IV/c	5
4.	IV/b	6
5.	IV/a	5
6.	III/d	27
7.	III/c	5
8.	III/b	7
9.	III/a	2
10.	II/d	5
11.	II/c	4
12.	II/b	1
13.	II/a	-
14.	I/d	-
15.	I/c	-
16.	I/b	-
17.	I/a	-
18.	Tenaga PPPK	62
19.	THL	1
20.	Tenaga Outsourcing	48
	Jumlah	178

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DTPHPKP Kab Magetan th.2022

**Tabel 2.2. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	1
3.	Kepala Bidang	III.b	4

4.	Kasubag	IV.a	1
5.	JFT Ahli Muda	-	12
6.	Staf/ Pelaksana	-	13
	Jumlah		32

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DLH Kab Magetan th. 2022

**Tabel 2.3. Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	5
2.	Strata 1 (S1)	75
3.	Sarjana Muda (D3)	8
4.	SLTA	29
5.	SLTP	-
6.	SD	-
	Jumlah	117

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DTPHPKP Kab Magetan th. 2022

**Tabel 2.4. Jumlah ASN yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Spamen / Diklatpim Tk. II	1
2.	Spama / Diklatpim Tk. III	2
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	8
	Jumlah	11

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DTPHPKP Kab Magetan th. 2022

### 2.2.2. Asset / Modal

Dalam upaya mendukung tugas pokok dan fungsi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan telah memiliki asset/modal diantaranya asset lahan/tanah, bangunan, alat mesin dan lain sebagainya. Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 Total Aset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sebesar Rp. 66.552.251.141 Aset yang dimiliki Dinas Tanaman

Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.5. Asset yang dimiliki Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan**

No.	JENIS	JUMLAH (Rp)
1.	Tanah	8.131.285.840
2.	Golongan Peralatan dan Mesin	8.131.285.840
3.	Golongan Gedung dan Bangunan	31.682.873.321
4.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.327.244.520
5.	Aset tetap lainnya	75.235.000
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	49.816.600
	<b>TOTAL</b>	<b>32.870.447.503</b>

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DTPHPKP Kab

Magetan th. 2022

**Tabel 2.6. Keragaan Aset Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan**

No.	Jenis	Unit	Asal	Kondisi
1	Sawah ditanami padi	11	APBD	Baik
2	Sawah ditanami tebu	2	APBD	Baik
3	Sawah ditanami sayuran	5	APBD	Baik
4	Tanah ditanami tanaman luar pekarangan	1	APBD	Baik
5	Tanah bangunan pasar	1	APBD	Baik
6	Tanah bangunan kantor pemerintah	2	APBD	Baik
7	Tanah sawah	1	APBD	Baik
8	Tanah tegalan	2	APBD	Baik
9	Tanah kebun	3	APBD	Baik
10	Tanah kosong	1	APBD	Baik
11	Tanah Kebun pembibitan	1	APBD	Baik
12	Tanah waduk	9	APBD	Baik
13	Tanah lapangan	1	APBD	Baik

14	Dump Truck	1	APBD	Rusak ringan
15	Genset	3	APBD	Rusak ringan
16	Stationary Water Pump	1	APBD	Baik
17	Sumersible Pump	15	APBD	Baik & Rusak ringan
18	Pompa Tangan	1	APBD	Rusak ringan
19	Station Wagon	3	APBD	Baik & Rusak ringan
20	Pick Up	2	APBD	Baik & Rusak ringan
21	Sepeda Motor	94	APBD	Baik & Rusak ringan
22	Gerobak Dorong	7	APBD	Baik & Rusak ringan
23	Troli	1	APBD	Baik
24	Mesin Gergaji Logam	3	APBD	Baik & Rusak ringan
25	Mesin Bor	2	APBD	Baik
26	Grating Generator Unit	1	APBD	Baik
27	Alat Ukur Kadar Air	2	APBD	Baik
28	Timbangan Cepat	22	APBD	Baik & Rusak ringan
29	Bajak Muara	1	APBD	Baik
30	Tractor Tangan	5	APBD	Baik & Rusak ringan
31	Chain Saw	3	APBD	Baik
32	MIST Blower	2	APBD	Baik
33	Alat Pengumpul/Penyedot Padi	7	APBD	Baik & Rusak ringan
34	Container	1	APBD	Baik
35	Lemari Penyimpan	2	APBD	Baik
36	Alat Penggilingan Padi	5	APBD	Baik & Rusak ringan
37	Alat Pencacah Hijauan	2	APBD	Baik
38	Alat Pengayak Janggolan	1	APBD	Baik

39	Penyemprot Otomatis (Automatis Spayer)	5	APBD	Baik & Rusak ringan
40	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	24	APBD	Baik & Rusak ringan
41	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	120	APBD	Baik & Rusak ringan
42	Ani-ani	2	APBD	Baik
43	Alat Perontok Mesin (Power thersar)	2	APBD	Baik & Rusak ringan
44	Alat Pengering (Dreyer)	1	APBD	Baik
45	Rak-rak penyimpanan	2	APBD	Baik
46	Lemari Penyimpanan	2	APBD	Baik
47	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	APBD	Baik
48	Lemari Besi/Metal	60	APBD	Baik & Rusak ringan
49	Rak Besi/Metal	8	APBD	Baik & Rusak ringan
50	Filling Besi/Metal	37	APBD	Baik & Rusak ringan
51	Brankas	1	APBD	Baik
52	Lemari Kaca	9	APBD	Baik & Rusak ringan
53	Rak susun	5	APBD	Baik & Rusak ringan
54	Papan Visuil	1	APBD	Baik
55	Alat Penghancur Kertas	1	APBD	Baik
56	Papan Tulis	1	APBD	Baik
57	Jaringan CCTV	2	APBD	Baik
58	Teralis	1	APBD	Baik
59	LCD Proyektor	31	APBD	Baik & Rusak ringan
60	Tripod Screen LCD Projector	1	APBD	Baik
61	Etalase	2	APBD	Baik
62	Lemari Kayu	5	APBD	Baik &

				Rusak ringan
63	Meja Kayu/Rotan	159	APBD	Baik & Rusak ringan
64	Kursi Besi / Metal	148	APBD	Baik & Rusak ringan
65	Meja Rapat	13	APBD	Baik & Rusak ringan
66	Meja Resepsion	1	APBD	Baik
67	Kursi Rapat	141	APBD	Baik & Rusak ringan
68	Kursi Tamu	11	APBD	Baik & Rusak ringan
69	Kursi Biasa	51	APBD	Baik & Rusak ringan
70	Tenda	6	APBD	Baik
71	Sofa	3	APBD	Baik & Rusak ringan
72	Mesin Potong Rumput	12	APBD	Baik & Rusak ringan
73	Lemari Es	8	APBD	Baik & Rusak ringan
74	AC Unit	20	APBD	Baik & Rusak ringan
75	Kipas Angin	5	APBD	Baik & Rusak ringan
76	Kompore Gas	4	APBD	Baik & Rusak ringan
77	Alat Dapur Lainnya	1	APBD	Baik
78	Oven Listrik	1	APBD	Baik
79	Tabung Gas	4	APBD	Baik
80	Alat Pemanas	2	APBD	Baik
81	Televisi	21	APBD	Baik & Rusak ringan
82	Sound System	24	APBD	Baik & Rusak ringan
83	Wireless	21	APBD	Baik & Rusak ringan

84	Megaphone	23	APBD	Baik & Rusak ringan
85	Stabilisator	1	APBD	Baik
86	Camera Video	18	APBD	Baik
87	Timbangan Barang	5	APBD	Baik
88	Tangga Alumunium	8	APBD	Baik & Rusak ringan
89	Dispencer	10	APBD	Baik & Rusak ringan
90	Handy Cam	4	APBD	Rusak ringan
91	Gordyn/Tirai	2	APBD	Rusak ringan
92	Tandon Air (Bak Penyimpan Air)	1	APBD	Baik
93	Alat pemotong rumput	3	APBD	Baik & Rusak ringan
94	Alat Pemadam/Portable	1	APBD	Baik
95	P.C. Unit	21	APBD	Baik & Rusak ringan
96	Lap Top	77	APBD	Baik & Rusak ringan
97	Note Book	2	APBD	Rusak ringan
98	Finger print	1	APBD	Rusak ringan
99	Printer	40	APBD	Baik & Rusak ringan
100	Scanner	5	APBD	Baik & Rusak ringan
101	Meja Kerja Pejabat	29	APBD	Baik & Rusak ringan
102	Meja Kerja Pegawai	68	APBD	Baik & Rusak ringan
103	Meja Tamu Biasa	9	APBD	Baik & Rusak ringan
104	Kursi Kerja Pejabat	61	APBD	Baik & Rusak ringan
105	Kursi Kerja Pegawai	140	APBD	Baik & Rusak ringan
106	Kursi Tamu di Ruangan	1	APBD	Rusak ringan

	Pejabat			
107	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	21	APBD	Baik & Rusak ringan
108	Camera + Attachment	1	APBD	Baik
109	Power Amplifier	1	APBD	Baik
110	Home Theater	1	APBD	Baik
111	Camera Digital	20	APBD	Baik & Rusak ringan
112	Tripod Camera	1	APBD	Baik
113	Lensa kamera	1	APBD	Baik
114	Mixer PVC	1	APBD	Baik
115	Loudspeaker	1	APBD	Baik
116	Facsimile	1	APBD	Rusak ringan
117	Global Position Satelite (GPS)	1	APBD	Rusak ringan
118	Tiang Listrik	12	APBD	Baik
119	Mobile Laboratorium Set	1	APBD	Baik
120	Test For Humydity	1	APBD	Rusak ringan
121	Alat ukur kemanisan buah	1	APBD	Baik
122	Autoclave	1	APBD	Baik
123	Laminar Air Flow	1	APBD	Baik
124	Hemacytemeter Complete	4	APBD	Baik & Rusak ringan
125	Frying Pan	2	APBD	Baik
126	Ice Maker	1	APBD	Baik
127	Mixer	1	APBD	Baik
128	Pompa Airasil	7	APBD	Baik & Rusak ringan
129	Beater Unit (Mesin Penggiling)	1	APBD	Baik
130	Transimulator	1	APBD	Baik
131	Rod Blower	2	APBD	Baik
132	Tungku	1	APBD	Baik

133	Granulator	1	APBD	Baik
134	Mikroskop	1	APBD	Baik
135	Bangunan Gedung Kantor Permanen	12	APBN & APBD	Baik
136	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	7	APBD	Baik
137	Bangunan Sarana Kebersihan dan Kesehatan	2	APBD	Baik
138	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	1	APBD	Baik
139	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	7	APBN & APBD	Baik
140	Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen	1	APBD	Baik
141	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	3	APBD	Baik
142	Gedung Pos Jaga Permanen	5	APBD	Baik
143	Gedung Menara Peninjau Permanen	1	APBD	Baik
144	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	APBD	Baik
145	Lantai Jemur	2	APBD	Baik
146	Gudang Alsintan	2	APBD	Baik
147	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2	APBD	Baik
148	Gedung Balai Latihan Pertanian	2	APBD	Baik
149	Gedung Bibit Pertanian	3	APBD	Baik
150	Gedung Gudang Benih Pertanian	6	APBD	Baik
151	Pagar Pengaman Bangunan Kantor	10	APBD	Baik
152	Pagar Bangunan lainnya	3	APBD	Baik
153	Gedung / Bangunan	2	APBD	Baik

	Parkir			
154	Bangunan Taman	5	APBD	Baik
155	Jalan Khusus	12	APBD	Baik
156	Bendungan	2	APBD	Baik
157	Sumur dengan Pompa	4	APBD	Baik
158	Saluran Induk	6	APBD	Baik
159	Drainase/selokan air	1	APBD	Baik
160	Bangunan Pengeluaran/Pintu	1	APBD	Baik
161	Bangunan Pengaman Saluran Air / Talud	3	APBD	Baik
162	Bangunan Pengambilan Dari Sumber Air	1	APBD	Baik
163	Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	4	APBD	Baik
164	Saluran Pembawa Air Baku Tertutup	1	APBD	Baik
165	Bangunan Kolam Ikan Air Tawar	1	APBD	Baik
166	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Kecil	1	APBD	Baik
167	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	1	APBD	Baik

*Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DTPHPKP Kab*

*Magetan th. 2022*

### **2.2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 77 Tahun 2016, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan memiliki 1 (satu) urusan wajib, yaitu urusan ketahanan pangan, dan 1 (satu) urusan pilihan yaitu urusan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan, sub sektor hortikultura dan sub sektor perkebunan.

Tingkat capaian kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan berdasarkan sasaran/ target Renstra periode sebelumnya (2013-2018) menurut indikator

kinerja utama sebagaimana pada tabel 2.3. sedangkan capaian untuk pengelolaan keuangan selama periode 2013 sampai dengan 2018 ditampilkan pada tabel 2.4.

**Tabel T-C.23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan**  
**Kabupaten Magetan**

NO	INDIKATOR KINERJA	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
	PANGAN															
1	Skor Pola Pangan Harapan (SDGs)	89,4	89,5	89,7	90	90	85,2	84,9	88,8	92,6			94,86%	100,78%	100%	
2	Penguatan cadangan pangan (%)	75	80	85	90	95	75	80	85	90	100%	123,25%	77,73%	100%		
3	Penanganan daerah rawan pangan (%)	20	40	60	80	100	20	40	60	80	100%	100%	100%	100%		
	PERTANIAN															
1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (juta rupiah)	3.652.424,43	3.750.260,12	3.848.095,82	3.945.931,52	4.043.767,21	3.517.329,45	3.602.281,8	3.598.978,85	3.581.050,84			96,05%	89%	90,75%	
	Produksi pertanian															
	• Padi (kw)	3.494.720	3.533.460	3.968.594	3.972.562	3.650.400	3.960.670	3.944.686	3.969.456	3.972.781	113,33	111,63%	113,3%	100%		
	• Jagung (kw)	1.103.300	1.112.960	1.122.660	1.132.400	1.142.180	995.700	1.221.972	1.187.660	1.623.133	90,25	109,79%	90,24%	143,3%		
	• Kedelai (kw)	3.494.720	3.533.460	14.430	21.900	7.200	45.840	7179	10.420	14.710	13,12	0,2%	1,31%	67,1%		
	• Ubi Jalar (ton)	24.150	26.250	28.400	30.600	32.850	43.078	35.110	39.641	647.870	178,38	1337%	17837%	2117%		
	• Kelapa (kg)	1.231.500	1.231.800	1.232.100	1.232.400	1.232.700	922.000	727.000	887.600	170.523	74,87	59,01%	74,86%	13,8%		
	• Kopi (kg)	199.000	204.000	209.000	214.000	216.000	219.000	224.200	226.000	442.760	110,05	110,78%	110,01%	206,8%		
	• Kakao (kg)	290.000	300.000	310.000	320.000	330.000	311.000	334.000	288.100	555.160	107,24	111,33%	107,18%	173,4%		
	• Tebu (ton)	535.350	541.800	548.250	554.700	561.225	428.663	412.881	402.256	389.690	80,07	76,21%	80,07%	70,25%		
	• Tembakau (kw)	2.468	2.492	2.517	2.542	2.568	3.630	2480	2760	1.357	147,08	99,52%	147,08%	53,38%		
	• Jeruk besar (kw)	189.651	191.547	262.574	262.836	155.0	262.050	149.380	244.395	511.517	138,17	77,99%	138,1	194,6		

						00							7%	%	
	● Strawberry (kw)	176	178	180	182	184	141	116	115	16		80,11	65,17%	80,11%	8,7%
	● Sayuran (Bw. Merah, Bw. Putih, Cabe, Kentang, Wortel) (kw)	319.059	322.250	325.250	328.727	332.014	333.354	332.483	435.983	424.461		104,48	103,18%	131,24%	129,12%

Berdasarkan tabel T-C.23. untuk masing – masing indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Magetan dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### **A. Urusan Ketahanan Pangan**

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan suatu indikator untuk mengukur ketahanan pangan melalui pencapaian nilai ragam konsumsi pangan dan gizi seimbang. Pola Pangan Harapan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam mengevaluasi konsumsi pangan penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas sehingga dapat mengantisipasi adanya gizi buruk serta beragam penyakit yang disebabkan olehnya. Skor PPH yang tinggi menjadi situasi yang hendak dicapai oleh setiap pemerintah daerah dan pusat. Penganekaragaman Konsumsi Pangan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan skor PPH sehingga dapat menambah kualitas hidup masyarakat melalui konsumsi pangan yang cukup gizi secara kuantitas dalam komposisi yang seimbang bagi setiap individu. Nilai capaian peningkatan skor PPH didapat melalui komposisi kelompok pangan utama untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Apabila skor PPH semakin tinggi, maka konsumsi pangan akan semakin beragam, bergizi dan seimbang.

Skor pola pangan harapan Kabupaten Magetan dari tahun 2020 sampai 2021 mengalami kenaikan. Kenaikan ini terjadi karena mulai pulihnya daya beli masyarakat setelah terkena Pandemi Covid-19.

#### **B. Urusan Pertanian**

Selama periode tahun 2020-2021 untuk capaian kinerja urusan pertanian dijelaskan sebagai berikut :

##### **1. PDRB pertanian**

PDRB juga dapat diartikan sebagai keseluruhan jumlah nilai produksi, baik barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah tertentu atau regional selama satu tahun tertentu. PDRB pertanian di kabupaten Magetan pada tahun 2021 tidak memenuhi target renstra. Kondisi Covid-19 bisa jadi berpengaruh pada produksi barang dan jasa.

##### **2. Berdasarkan tabel diatas, realisasi produksi komoditas pertanian yang mencapai target adalah padi, jagung, ubi jalar, kopi, kakao, tebu, jeruk besar dan sayuran. Capaian kinerja tertinggi pada sayuran karena siklus tanaman hortikultura lebih cepat, sedangkan komoditas yang produksinya tidak mencapai target adalah kedelai, tembakau dan stroberi. Capaian kinerja untuk komoditas padi cenderung fluktuatif, kembali terjadi kenaikan sebesar 3,52 % di tahun 2022 dan sudah mencapai target RKPD tahun 2022. Capaian produksi jagung menunjukkan hasil yang fluktuatif dimana dalam tahun 2022 terjadi peningkatan hasil produksi sebesar 36,67 % dan melebihi**

capaian target RKPD tahun 2022. Capaian produksi kedelai menunjukkan hasil yang fluktuatif dimana dalam rentang dua tahun terakhir terjadi peningkatan hasil produksi namun masih di bawah target. Capaian produksi komoditas ubi jalar cenderung positif dengan peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Capaian produksi tebu dalam enam tahun terakhir terus mengalami penurunan dikarenakan luas tanam tebu menurun serta animo petani untuk menanam tebu menurun disebabkan harga tebu tidak sesuai harapan petani. Komoditi jeruk besar cenderung mengalami hasil produksi yang fluktuatif, dimana dalam dua tahun terakhir ini produksi jeruk besar naik secara signifikan sebesar 29,9 %. Sedangkan untuk komoditi stroberi mengalami tren penurunan selama enam tahun terakhir disebabkan oleh luas tanaman yang tidak meningkat dan diperparah dengan tidak ada program yang mendukung peningkatan produksi stroberi. Adanya anomali cuaca membuat petani memilih komoditas lain yang lebih aman, sehingga Ketika ditawarkan program peningkatan produksi stroberi petani menolak. Komoditas kelapa juga mengalami penurunan karena adanya serangan hama wangwung

**Tabel T-C.24.**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan**  
**Kabupaten Magetan**

Uraian	Anggaran pada tahun ke				Realisasi anggaran pada tahun ke				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke (%)				Rata-rata pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Pengembangan cadangan pangan daerah	230.000.000	1.727.176.700			201.701.367	1.633.088.755			87,70%	94,55%				
Peningkatan pola Konsumsi Pangan	345.000.000	907.340.000			333.036.841	860.429.477			96,53%	94,83%				
Pemantauan dan Analisis ketersediaan Pangan Pokok	154.000.000	60.000.000			139.202.000	59.644.030			90,39%	99,41%				
Pengembangan Olahan hasil Pertanian	275.000.000	10.255.150			261.546.250	9.898.650			95,11%	96,52%				
<b>GAJI</b>	<b>9.531.939.309</b>	<b>9.358.168.132</b>			<b>8.831.157.688</b>	<b>8.639.591.253</b>			<b>92,65%</b>	92,32%				
Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	825.000.000	770.250.000			805.763.976	750.754.188			97,67%	97,47%				

Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	225.000.000	87.500.000			224.439.941	10.920.250			99,75%	75,21%				
Survey Kepuasan Masyarakat	20.000.000	14.520.250			19.980.000	76.908.405			99,90%	87,90%				
Pembangunan gedung kantor	1.360.000.000	329.786.652			1.342.374.690	320.130.000			98,70%	97,07%				
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	675.000.000	20.000.000			662.775.500	15.092.400			98,19%	75,46%				
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	250.000.000	131.700.000			248.220.841	112.936.243			99,29%	85,75%				
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pekarangan Kantor Dinas		9750000				9.750.000				100,00%				
Pengadaan Perlengkapan Kantor	250.000.000	<b>12867000</b>			240.127.800	11.962.800			96,05%	92,97%				
Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	45.000.000	<b>24250000</b>			42.064.300	24.249.400			93,48%	100,00%				
Pembangunan gedung Balai Penyuluh Pertanian	1.500.000.000	<b>249539506</b>			1.379.925.600	246.304.000			92,00%	98,70%				
Pengadaan perlengkapan balai penyuluhan pertanian	878.170.000	<b>27300000</b>			684.422.500	-			77,94%	0,00%				
Pembangunan gedung balai penyuluhan pertanian (BU dan		<b>54000000</b>				44.524.20				82,45%				

pendamping DAK)						0								
Pendidikan dan pelatihan formal	25.000.00 0	<b>9500000</b>			22.759.60 0	8.113.000			91,04%	85,40%				
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	75.000.00 0	-			66.513.12 0	-			88,68%	-				
Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	20.000.00 0	<b>1234010</b> <b>0</b>			19.745.00 0	12.239.35 0			98,73%	99,18%				
Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Perangkat Daerah	160.000.0 00	<b>8391250</b> <b>0</b>			154.954.5 00	81.167.50 0			96,85%	96,73%				
Peningkatan kemampuan lembaga petani	75.000.00 0	60.900.00 0			74.049.00 0	60.721.65 0			98,73%	99,71%				
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	675.000.0 00	169.904.7 50			661.974.1 50	165.015.6 00			98,07%	97,12%				
Pengembangan pusat-pusat etalase/eksebis/promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan	2.095.000 .000	586.275.0 00			2.072.942 .492	576.287.3 35			98,95%	98,30%				
Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	1.210.000 .000	1.769.827 .900			1.163.613 .149	1.654.864 .401			96,17%	93,50%				
Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	570.000.0 00	426.400.0 00			566.377.7 00	421.062.4 50			99,36%	98,75%				
Penerapan pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural Practices	102.600.0 00	99.318.00 0			102.515.0	60.560.90			99,92%	60,98%				

Tembakau					00	0								
Penanganan panen dan pasca panen	400.000.000	275.000.000			363.285.000	251.327.750			90,82%	91,39%				
Dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau	230.000.000	255.000.000			222.913.200	250.265.850			96,92%	98,14%				
Penumbuhan dan penguatan kelembagaan	120.000.000	120.000.000			119.930.000	86.841.100			99,94%	72,37%				
Penerapan inovasi teknis	50.000.000	150.682.000			50.000.000	26.256.800			100,00%	17,43%				
Peningkatan produksi, Produktivitas dan Produk Serealia	1.085.000.000	500.000.000			1.055.321.100	488.136.250			97,26%	97,63%				
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu aneka kacang dan Umbi	300.000.000	115.000.000			292.011.000	110.480.000			97,34%	96,07%				
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tanaman Pangan	400.000.000	101.376.850			397.108.650	101.208.850			99,28%	99,83%				
Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk buah-buahan	3.180.000.000	1.780.302.950			3.044.340.900	1.549.736.375			95,73%	87,05%				
Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Florikultura	550.000.000	382.373.500			531.259.000	337.842.450			96,59%	88,35%				
Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Sayuran	425.000.000	216.807.000			419.798.000	206.903.250			98,78%	95,43%				

Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Biofarmaka	300.000.000	199.300.000			117.485.000	170.876.450			39,16%	85,74%				
Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk tanaman semusim	300.000.000	21.577.500			258.004.000	21.577.500			86,00%	100,00%				
Peningkatan Produksi/Produktivitas dan mutu produk Tanaman Tahunan	110.000.000	84.925.300			105.900.000	82.365.000			96,27%	96,99%				
Penanganan pasca panen hasil perkebunan	50.000.000	23.575.000			48.594.000	23.507.500			97,19%	99,71%				
Peningkatan Sarana Prasarana Lahan (Rehab Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi)	9.169.800.000	8.761.300.000			8.936.439.950	8.573.798.791			97,46%	97,86%				
Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi	15.763.900.000	10.685.935.000			15.427.885.117	10.534.831.844			97,87%	98,59%				
Penyusunan Kebijakan Percepatan Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian (LP2B)	305.000.000	308.000.000			259.951.500	307.072.620			85,23%	99,70%				
Peningkatan Sarana Prasarana Irigasi (DAK)	2.117.750.000	1.880.000.000			2.096.924.945	1.880.000.000			99,02%	100,00%				
Pengadaan Prasarana Pertanian/Perkebunan	442.500.000	370.000.000			372.777.739	345.018.700			84,24%	93,25%				
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	180.000.000	54.928.050			177.336.000	51.747.655			98,52%	94,21%				
Pendampingan Pembiayaan Pertanian/Perkebunan (Pinjaman)	100.000.000	<b>2500000</b>			92.677.03				92,68%	35,41%				

Daerah)	00	0			7	8.852.950								
Rehabilitasi Jalan Usahat Tani dan Produksi (DID Tambahan)		600.000.000				595.066.000				99,18%				
Biaya Pendamping Rehabilitasi Jalan Usaha Tani dan Produksi DID-T(DAU)		25.000.000				22.919.750				91,68%				
Pengadaan Prasarana Pertanian / Perkebunan (DID Tambahan)		4.800.000.000				4.435.556.250				92,41%				
Biaya Umum Pendamping Kegiatan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian DID-T (DAU)		174.000.000				146.550.000				84,22%				
Penyediaan sarana prasarana agrowisata	900.000.000	3.745.525.250			840.658.420	3.368.514.723				93,41%	89,93%			
Penyediaan Sarana dan Prasarana Agrowisata (DID Tambahan)		430.000.000				423.275.000				98,44%				
Belanja bantuan sosial kepada petani miskin	500.000.000	500.000.000			8.042.500	432.933.350				1,61%	86,59%			
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>														
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik			0,00	22.500.000			0,00	22.457.90			0	99,81		

								0					
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>													
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan													
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			0,00	10.500.000			0,00	10.498.625			0	99,98	
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			50.000.000,00	50.000.000			49.458.332,00	49.187.000			98,91	98,37	0
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			35.000.000,00	28.500.000			34.360.000,00	27.958.625			98,17	98,1	-18
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			11.160.000,00	10.500.000			10.560.000,00	10.500.000			94,62	100	5
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi													
Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			265.000.000,00	170.000.000			262.288.370,00	164.917.069			98,97	97,01	-35
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			140.000.000,00	60.000.000			138.970.000,00	52.000.000			99,26	86,67	-57
<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>													
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan													
Penyusunan , Pemutakhiran dan Analisa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			11.000.000,00	14.000.000			10.570.000,00	13.896.500			96,09	99,26	27

Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota														
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten / Kota			95.590.00 0,00	70.000.00 0			92.730.00 0,00	54.320.00 0			97	77,6	-26	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota			362.425.8 00,00	265.000.0 00			335.366.3 00,00	56.180.00 0			92,53	21,2	-26	
<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>														
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota														
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota			20.000.00 0,00	24.000.00 0			18.913.00 0,00	23.757.57 0			94,56	98,98	20	
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota			40.000.00 0,00	35.000.00 0			38.321.00 0,00	33.064.90 0			95,8	94,47	-12,5	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			84.499.95 0,00	67.500.00 0			80.798.85 0,00	66.528.45 0			95,61	98,56	-20	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			14.867.01 9.251,00	12.721. 851.300			11.772. 481.796 ,00	11.959.37 4.564				94,00	-14	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan			300.000.0 00,00				256.103.1 00,00				85,36			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan - Undangan			9.999.900, 00				7.379.900, 00				73,79			

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah														
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			9.995.050,00	8.811.550			9.995.050,00	8.611.550			100	97,73	-11	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			106.700.200,00	239.590.150			94.876.300,00	227.263.700			88,91	94,73	124	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			62.333.000,00	45.045.000			61.133.000,00	44.638.800			98,07	99,09	-27	
Penyediaan Barang Cetak			32.022.500,00	23.644.000			31.422.500,00	21.202.900			98,12	89,67	-26	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan			7.900.000,00	8.000.000			7.570.000,00	7.730.000			95,82	96,62	12	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			43.300.000,00	80.850.000			43.194.740,00	78.410.215			99,75	96,98	86	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			212.946.400,00	209.150.000			175.500.521,00	190.773.882			82,41	91,21	-1,7	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			24.999.950,00	52.280.000			24.846.500,00	51.251.000			99,38	98,03	109	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.125.484.400,00	1.162.328.400			1.001.152.100,00	1.153.754.000				99,26	3,2	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			37.937.750,00	36.000.000			35.324.298,00	32.670.000			93,11	91,14	-0,5	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan			75.400.500,00	69.257.000			71.129.115,00	63.125.897			94,33	90,75	-0,8	

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			22.600.00 0,00	990.250.0 00			22.000.00 0,00	976.840.0 69			97,34	98,64	4281
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			10.199.50 0,00	19.800.00 0			9.950.000, 00	19.280.00 0			97,55	97,37	94
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>													
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian													
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			2.812.339. 800,00	5.793.798 .800			2.641.977. 925,00	5.467.501 .829			93,94	94,36	-25
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			941.728.8 00,00	1.207.548. 500			782.473.3 45,00	1.087.403 .500			83,08	90,05	28
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota													
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan / Tanaman			1.316.815. 900,00	1.650.500 .000			1.273.320. 274,00	1.645.397 .294			96,69	99,69	25
Pemanfaatan SDG Hewan / Tanaman			207.811.5 00,00	634.661.0 00			192.560.5 00,00	606.379.1 20			92,66	99,16	205
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>													
Pengembangan Prasarana Pertanian													
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B			108.164.1 00,00	355.000.0 00			106.071.3 00,00	354.410.6 50			98,06	99,83	228

Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			2.550.558.500,00	4.642.325.000			2.173.620.250,00	4.174.473.187			85,22	89,92	82
Pembangunan Prasarana Pertanian													
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			8.378.500.000,00	13.165.550.000			8.041.256.907,00	12.924.920.875			95,97	98,17	57
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian			120.000.000,00				120.000.000,00						0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			8.355.840.000,00	16.056.700.000			8.272.801.200,00	15.765.258.895			99	98,18	92
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit			3.940.000.000,00	-			3.785.000.000,00	-			96	-	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya			2.204.439.480,00	-			2.000.795.700,00	-				-	0
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			4.068.898.550,00	3.009.686.250			3.611.678.914,00	2.993.284.990			88,7	99,45	26
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN													
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota													
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan			101.003.600,00	469.000.000			97.076.950,00	465.892.700			96,11	99,16	364
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN													
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian													
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			154.999.400,00	302.800.000			144.581.469,00	278.857.575			93,27	92,09	95
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			40.000.000,00	63.000.000			24.999.000,00	46.265.000			62,49	73,43	57

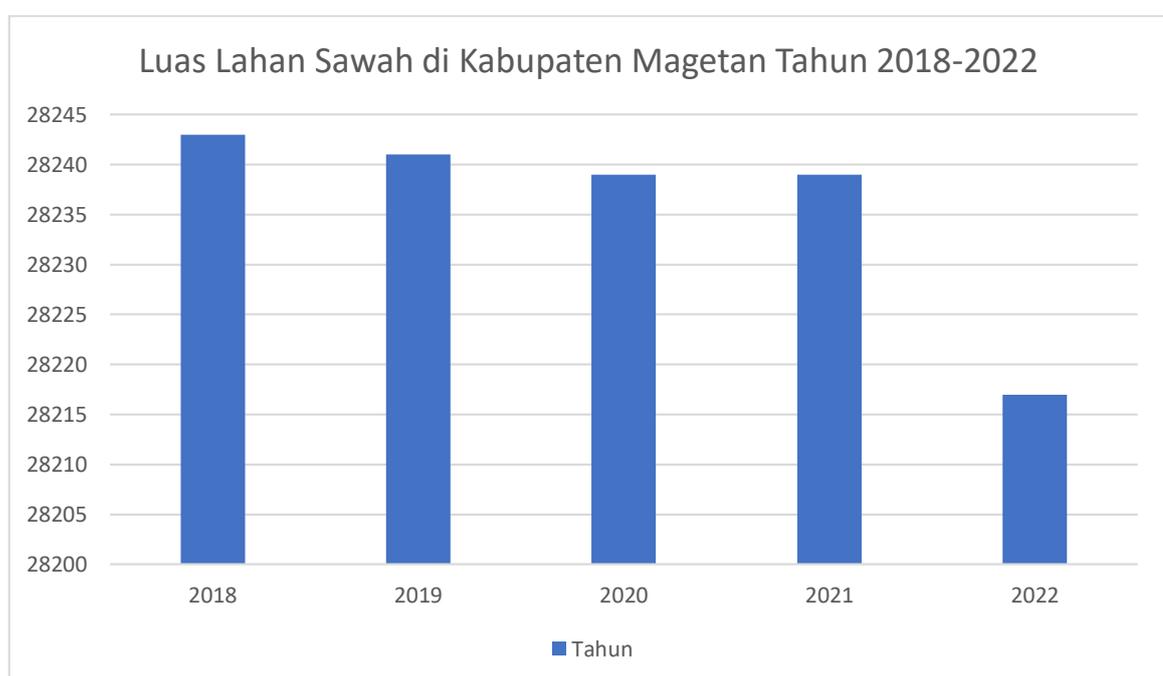
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			183.690.000,00	800.000.000			120.201.400,00	664.317.950			65,43	83,03	335	
			<b>53.548.303.781</b>	<b>64.565.726.950</b>										

Secara umum pertumbuhan anggaran dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan. Walaupun secara umum pagu total mengalami kenaikan namun terdapat beberapa sub kegiatan yang mengalami penurunan anggaran. Kenaikan anggaran secara signifikan terjadi saat PAPBD 2022. Jumlah pagu anggaran yang besar masih didominasi oleh sub kegiatan yang menangani pekerjaan fisik di bidang pertanian.

### 2.3. Tantangan dan Peluang

Kabupaten Magetan merupakan salah satu kabupaten sebagai lumbung pangan Jawa Timur. Berdasarkan data potensi wilayah, sebagian besar wilayah di Kabupaten Magetan merupakan wilayah potensi pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura sehingga merupakan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Magetan. Selama ini, pertumbuhan produksi pertanian di Kabupaten Magetan masih berbasis pada ketersediaan lahan dan pertumbuhan produktivitas masih mengalami peningkatan. Namun ketersediaan lahan selama 10 tahun terakhir cenderung menurun. Penyebab utamanya adalah, alih fungsi lahan pertanian dari beberapa kegiatan ekonomi yang masih terus berlangsung sehingga perkembangan luasan lahan pertanian setiap tahun berubah peruntukannya.

Gambar 2.2. Luas Lahan Sawah di Kabupaten Magetan, tahun 2018 – 2022



Sumber : Dinas TPHPKP

Perkembangan luas lahan sawah di Kabupaten Magetan menurut Kabupaten Magetan selama Tahun 2018-2022 cenderung mengalami penurunan. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2022. Hal ini karena adanya pengalihan lahan menjadi lahan bukan pertanian (jalan, sungai, pemukiman dll)

Tantangan pembangunan pertanian ke depan dari infrastruktur dan prasarana serta sarana pertanian di Kabupaten Magetan yaitu bagaimana memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air; bagaimana membudayakan petani menggunakan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; bagaimana mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim; mengupayakan dukungan alat mesin pertanian untuk meningkatkan produksi, nilai tambah serta menekan susut hasil pertanian yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 jumlah jaringan irigasi tersier yang telah diperbaiki sebanyak 179 titik di 18 kecamatan dengan Panjang 12.740 m. Tentunya jumlah ini masih kurang mencukupi dibandingkan luas lahan sawah yang ada di Kabupaten Magetan yakni seluas 28.217 hektar.

Sebagaimana hasil telaahan terhadap RTRW, sinkronisasi dan keselarasan dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dengan RTRW telah dilakukan untuk menjamin kepastian dalam aspek spasial (keruangan), sektoral, tata guna lahan, serta aspek lain yang terkait dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Hasil telaah atas dokumen-dokumen tersebut yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

Berdasarkan hasil kajian/telaah atas peluang dan tantangan dalam 3 tahun kedepan yang dihadapi berkaitan dengan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dituangkan sebagai berikut:

- a. Tantangan yang dihadapi diantaranya :
  1. Ketersediaan air
  2. Perbaikan infrastruktur lahan dan air, perbenihan/perbibitan
  3. Peningkatan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian
  4. Perubahan Iklim, Kerusakan Lingkungan dan Bencana Alam yang menyebabkan turunnya daya dukung alam
  5. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non

- pertanian(pemukiman dan industri)
6. Menurunnya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian
  7. Penerapan pertanian dengan prinsip ramah lingkungan
  8. Penanganan pascapanen serta pemberian nilai tambah pada produk pertanian
  9. Penerapan teknologi di bidang pertanian
- b. Peluang dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Magetan
1. Daya beli masyarakat yang terus meningkat serta jumlah penduduk yang terus meningkat besar merupakan pasar dalam negeri yang sangat potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani
  2. Peluang investasi dibidang agroindustri dan agribisnis cukup besar;
  3. Tersedianya fasilitas permodalan dari Bank/Lembaga Keuangan non-Bank;
  4. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/kelompok tani dengan pengusaha/ produsen;
  5. Terdapat kesenjangan antara produksi potensial dan aktual.



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Permasalahan Pelayanan PD

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan diperlukan dalam rangka pembangunan pertanian 3 (tiga) tahun kedepan. Permasalahan- permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"><li>• pembatasan alih fungsi lahan pertanian dengan regulasi yang ada (RTRW), LP2B</li><li>• Pembinaan tentang pelestarian lahan pertanian</li><li>• Pembangunan sektor jasa, industri dan pemukiman</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kabupaten tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Magetan sedang disusun dan belum diterapkan</li><li>• Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menjadi salah satu penyebab penurunan produksi pertanian.</li></ul>
2	Infrastruktur pertanian yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian</li><li>• Terjadinya kerusakan infrastruktur pertanian</li><li>• Swadaya masyarakat dalam pembangunan infrastruktur masih perlu ditingkatkan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan</li><li>• Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani</li></ul>

3	Sarana pertanian yang belum memadai	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitasi penyediaan sarana pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan dukungan dana untuk pengadaan</li> <li>Keterbatasan sarana menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai</li> </ul>
---	-------------------------------------	--	--

			rekomendasi
4	Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembinaan dan pendampingan Kelompok Tani yang ada belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target</li> </ul>
5	Adanya Anomali iklim, bencana dan serangan OPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Antisipasi dan mitigasi bencana alam belum optimal</li> <li>Fasilitasi pengendalian OPT</li> <li>SLPHT belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi</li> </ul>
6	Rendahnya posisi tawar petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme harga pasar</li> <li>Adanya perdagangan bebas</li> <li>Kebijakan penetapan harga dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak</li> </ul>
7	Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mekanisme harga pasar</li> <li>Adanya perdagangan bebas</li> <li>Kebijakan penetapan harga dasar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak</li> </ul>
8	Keterbatasan SDM pelaksana (Petani dan petugas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umur dan tingkat pendidikan petani</li> <li>Formasi petugas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pertanian kurang dari kebutuhan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan petani dan umur yang relatif tua menyebabkan rendahnya adopsi teknologi</li> <li>Keterbatasan petugas yang ada menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan pembangunan pertanian</li> </ul>

9.	Penganekaragaman/ diversifikasi pangan masih terbatas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani.</li> <li>• Perlunya pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis pangan lokal</li> <li>• Perlunya peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana.</li> <li>• Perlunya penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi penetapan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu tujuan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018-2023</li> <li>• Perlunya penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK dan Dasa Wisma dalam pengawasan dan pemantauan tumbuh kembang anak serta tindak lanjut (rujukan ) masalah gizi buruk</li> </ul>
----	--	--	--

### 3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026

Sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran RPD Kab Magetan 2024-2026**

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sistem Ekonomi Kerakyatan	1.1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Kabupaten Magetan
	1.2 Meningkatnya Realisasi Investasi Kabupaten Magetan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	2.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
	2.2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	3.1 Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data

	kemiskinan
	3.2 Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pendapatan Rendah
4. Mewujudkan Pembangunan Yang Berasaskan Lingkungan	4.1 Terjaganya Keseimbangan Ekosistem
	4.2 Berkurangnya Risiko Bencana Daerah
	4.3 Tercukupinya Kebutuhan Kawasan Perumahan yang Layak
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	5.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
	5.2 Meningkatnya Akuntabilitas dalam Manajemen Pemerintah
	5.3 Meningkatnya Keterpaduan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik
	5.4 Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
	5.5 Meningkatnya Profesionalisme dan Penyelenggaraan Tata Kelola Manajemen ASN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan mempunyai peran untuk ikut mensukseskan tujuan pertama RPD Kabupaten Magetan berikut ini :

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Meningkatkan PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya produksi tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	Produksi komoditas pertanian <ul style="list-style-type: none"> <li>• padi (kw)</li> <li>• Produksi jagung (kw)</li> <li>• Produksi</li> </ul>

			kedelai (kw) • Produksi tebu (ton) • Produksi tembakau (kw) • Produksi jeruk besar (kw) • Produksi kopi (kw) • Produksi wortel (kw) • Produksi kentang (kw) • Produksi bawang merah (kw)
--	--	--	---

### 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian**

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1	Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya pembangunan sektornon pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disusunnya Raperda LP2B</li> </ul>
		<p>pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani</li> <li>▪ Keterbatasan sarpras menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi</li> <li>▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target</li> <li>▪ Masih rendahnya kualitas SDM Pertanian</li> <li>▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian</li> <li>▪ Banyaknya jumlah petani dengan kualitas SDM yang bervariasi dan rata-rata masih rendah</li> <li>▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur</li> <li>▪ Pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan lembaga tani</li> <li>▪ Pelaksanaan SLIKlim dan Pemberdayaan Regu Perlindungan Tanaman</li> </ul>
	Peningkatan Diversifikasi Pangan	Kegiatan usaha tani sebagian besar masih bersifat subsistem dengan komoditas utama berupa bahan pangan pokok (padi)	Pola pikir/anggapan belum makan kalau belum makan nasi	Adanya sosialisasi dan penggalakan konsumsi pangan lokal

	Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran</li> <li>Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah</li> <li>Daya saing produk pertanian yang relatif rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkembangnya pasar bebas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>produk pertanian</li> <li>Sertifikas i produk pertanian</li> </ul>
	Peningkatan kesejahteraan petani	Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha	Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha tani	Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program kredit pertanian

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur</b>				
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat	Kegiatan usaha tani sebagian besar masih Bersifat subsistem Dengan komoditas utama berupa bahan pangan pokok (padi)	Pola pikir/ anggapan belum makan kalau belum makan nasi	Adanya sosialisasidan penggalakan konsumsi pangan lokal

2	Mempertahankan swasembada Padi dan jagung secara berkelanjutan dan mewujudkan swasembada kedelai dan tanaman Pangan Utama Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian</li> <li>▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani</li> <li>▪ Keterbatasan sarpras menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi</li> <li>▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian</li> <li>▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian</li> <li>▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal cetak sawah baru</li> <li>▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur</li> <li>▪ Pelaksanaan SLIKlim dan Pemberdayaan Regu perlindungan tanaman</li> </ul>
---	---	---	---	--

		<p>kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi</li> </ul>		
--	--	---	--	--

3	Pengamanan dan peningkatan produksi serta peningkatan nilai tambah melalui penanganan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rendahnya posisi tawar menyebabkan harga di tingkat petani dikendalikan oleh pedagang/ tengkulak</li> <li>▪ Fluktuasi harga komoditas pertanian yang disebabkan adanya panen raya dan sifat komoditas pertanian yang mudah rusak menyebabkan harga produk yang rendah</li> <li>▪ Daya saing produk pertanian yang relatif rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurang terbukanya akses/jaringan pemasaran</li> <li>▪ Sifat komoditas pertanian yang mudah rusak</li> <li>▪ Berkembangnya pasar bebas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian</li> <li>▪ Sertifikasi produk pertanian</li> </ul>
4	Peningkatan Mutu Produk dan mutu produk tanaman pangan dan hortikultura berbasis sumberdaya lokal yang berkelanjutan	Rendahnya akses permodalan menyebabkan kurangnya ketersediaan modal usaha	Keterbatasan petani dalam hal akses modal usaha	Kebijakan pemerintah tentang peluncuran berbagai program kredit pertanian
<b>Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur</b>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Meningkatkan intensifikasi, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan</li> <li>▪ Mengoptimalkan pengembangan perkebunan di lahan marginal</li> <li>▪ Mempertahankan existing lahan history perkebunan</li> <li>▪ Meningkatkan sarana dan prasarana budidaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (permukiman, industri, jasa) menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada penurunan luas tanam dan luas panen. Hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya pembangunan sektor non pertanian yang cukup pesat (jasa, industri) menyebabkan berkurangnya lahan pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya dukungan kebijakan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal cetak sawah baru</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengoptimalkan pengendalian hama penyakit dan gangguan usaha perkebunan</li> <li>▪ Meningkatkan pengawasan pemakaian dan peredaran benih perkebunan</li> <li>▪ Meningkatkan ketersediaan benih perkebunan unggul dan bermutu</li> <li>▪ Meningkatkan sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan</li> <li>▪ Meningkatkan kapasitas SDM dalam proses pasca panen Perkebunan</li> <li>▪ Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani perkebunan secara berkelanjutan</li> <li>▪ Meningkatkan Sekolah Lapang Perkebunan</li> <li>▪ Meningkatkan fasilitasi kelembagaan petani perkebunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi infrastruktur yang belum memadai menyebabkan peningkatan biaya produksi dan inefisiensi usaha tani</li> <li>▪ Keterbatasan sarpras menyebabkan penerapan teknologi belum sesuai rekomendasi</li> <li>▪ Kurang optimalnya fungsi kelembagaan yang ada menyebabkan pelaksanaan kegiatan dengan kelompok tani sebagai pelaksana tidak sesuai dengan target</li> <li>▪ Adanya anomali iklim, bencana alam (banjir, kekeringan) dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertanian</li> <li>▪ Adanya anomali iklim, bencana dan serangan OPT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan infrastruktur</li> <li>▪ Pelaksanaan SLIKlim dan Pemberdayaan Regu Perlindungan Tanaman</li> </ul>
--	---	--	---	---

### 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

#### 3.3.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan telaahan terhadap rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan beserta faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pembangunan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.5. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magetan**

No.	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pertanian	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Andalan	a. Barat b. Kartoharjo c. Karangrejo d. Maospati e. Takeran f. Nguntoronadi g. Plaosan h. Panekan i. Sidorejo j. Takeran k. Poncol	a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian b. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan	Adanya Kebutuhan Ketersediaan Sumberdaya Manusia, Sumberdaya alam dan Sumberdaya Buatan.	a. Barat (Padi, Kedelai) b. Kartoharjo (Padi, Kedelai) c. Karangrejo (padi) d. Maospati (Padi) e. Takeran (Padi) f. Nguntoronadi (Padi) g. Plaosan (Jagung, Ubi Jalar) h. Panekan (Ubi Jalar, Ubi Kayu, Jagung) i. Sidorejo (Ubi Jalar) j. Takeran (Kedelai) k. Poncol (Jagung)

**Tabel 3.6. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Magetan**

No.	Rencana Struktur Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pertanian	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan Andalan	Pemanfaatan Kawasan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil	Adanya Kebutuhan Ketersediaan Sumberdaya Manusia, Sumberdaya alam dan	a. Plaosan (Hortikultura) b. Sidorejo (Hortikultura) c. Poncol (Hortikultura)

			Pertanian c. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pertanian/ Perkebunan	Sumberdaya Buatan.	d. Panekan (Hortikultura) e. Bendo (Jeruk Pamelon) f. Takeran (Jeruk Pamelon) g. Sukomoro (Jeruk Pamelon) h. Kawedanan (Jeruk Pamelon) i. Maospati (Jeruk) j. Nguntoronadi (Jeruk)
--	--	--	--	--------------------	--

**Tabel 3.7. Hasil Telaahan Tata Ruang Wilayah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan terhadap RTRW Kabupaten Magetan**

No.		Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Dinas TPHPKP Kabupaten Magetan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.		a. Kawasan Andalan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barat (Padi, Kedelai)</li> <li>• Kartoharjo (Padi, Kedelai)</li> <li>• Karangrejo (padi)</li> <li>• Maospati (Padi)</li> <li>• Takeran (Padi)</li> <li>• Nguntoronadi (Padi)</li> <li>• Plaosan (Jagung, Ubi Jalar)</li> <li>• Panekan (Ubi Jalar, Ubi Kayu, Jagung)</li> <li>• Sidorejo (Ubi Jalar)</li> <li>• Takeran (Kedelai)</li> <li>• Poncol (Jagung)</li> </ul> b. Kawasan Budidaya <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaosan (Hortikultura)</li> <li>• Sidorejo (Hortikultura)</li> <li>• Poncol</li> </ul>	d. Alih Fungsi Lahan yang bukan menjadi kewenangan Dinas TPHPKP	a. Semakin tingginya alih fungsi lahan b. Keterbatasan permodalan petani	a. Penerapan teknologi ramah lingkungan b. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian

		(Hortikultura) • Panekan (Hortikultura) • Bendo (Jeruk Pamelon) • Takeran (Jeruk Pamelon) • Sukomoro (Jeruk Pamelon) • Kawedanan (Jeruk Pamelon) • Maospati (Jeruk) • Nguntoronadi (Jeruk)			
--	--	---	--	--	--

Meningkatnya alih fungsi lahan akan menyebabkan kerusakan lingkungan dimana kawasan yang semula merupakan kawasan untuk konservasi menjadi lahan budidaya yang menyebabkan kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air menjadi

berkurang dan rusaknya struktur tanah sehingga dalam jangka panjang akan berpotensi menyebabkan meningkatnya erosi dan banjir. Dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian pemanfaatan lahan perlu disusun suatu arahan perencanaan dan program yang meliputi :

- A. Arahan rencana pengendalian kawasan terbangun, meliputi :
  - a. Pembatasan pembangunan pada kawasan konservasi dan lahan pertanian produktif
  - b. Penetapan aturan dan perijinan yang berhubungan dengan alih fungsi lahan (Perdact.IMB) untuk kawasan terbangun.
  - c. Sistem reward dan punishment untuk mengurangi terjadinya alihfungsi lahan dengan sanksi yang tegas.
- B. Arahan rencana pengendalian alih fungsi lahan meliputi :
  - a. Program alih fungsi lahan pertanian dan perlindungan terhadap lahan pertanian produktif.
  - b. Perlindungan dan pencegahan alih fungsi lahan pada kawasan

lindung dan konservasi.

### 3.5. Isu-Isu Strategis

Kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam menyusun perencanaan pembangunan pertanian untuk 3 tahun yang akan datang, yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Pada tahun 2020 – 2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi yakni jumlah penduduk Indonesia yang berada pada usia produktif (15-65 tahun) mencapai 70 persen, sementara sisanya 30 persen adalah usia nonproduktif (< 15 th dan >65 th). Bonus demografi ini bisa menjadi peluang juga dapat menjadi ancaman apabila tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang sesuai dan memadai serta pada saat yang sama perlu dilakukan penyiapan sumber daya generasi muda yang berkualitas. Bagi sektor pertanian hal ini juga bisa menjadi ancaman manakala yang terjun ke sektor pertanian hanya berasal dari sisa bonus demografi (kualitas rendah) sehingga malah akan menyebabkan semakin menurunnya produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian. Untuk itu, menjadi tantangan pemerintah untuk menyediakan tenaga kerja pertanian yang mampu menguasai teknologi pertanian dan mau terjun ke bidang pertanian.

Sehubungan dengan revolusi industri 4.0 yang sedang terjadi, peran pemerintah sangat diperlukan untuk memberikan edukasi yang cukup bagi para petani agar dapat memasarkan hasil pertanian dan turunannya lebih cepat melalui jaringan digital.

Idealnya, di era revolusi industri saat ini, petani dapat memasarkan sendiri hasil pertaniannya. Berbagai aplikasi bermunculan untuk membantu petani dalam memasarkan hasil pertaniannya. Namun hal tersebut tidak efektif karena petani masih banyak petani yang kurang melek teknologi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain untuk mengelola hasil pertanian yang lebih efektif dan *profitable* dengan mengkolaborasikan petani yang sudah mempunyai pengalaman dan ketrampilan dengan pemuda yang melek teknologi sebagai agen pemasaran hasil pertanian dalam suatu kelompok.

Dari hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Isu-isu strategis yang mempengaruhi pembangunan pertanian tiga tahun mendatang adalah:

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Pertanian baik SDM petugas maupun SDM petani, maupun kelembagaan petani terkhusus petani milenial melalui kepedulian dan keperpihakan terhadap penyuluh pertanian lapang dan petani
2. Pencegahan terjadinya alih fungsi lahan pertanian akibat pembangunan sektor nonpertanian
3. Pengurangan dampak adanya gejala perubahan iklim akibat pemanasan global
4. Pembangunan sistem pertanian dari hulu sampai ke hilir
5. Peningkatan Kesejahteraan Petani.



## BAB 4

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra adalah bahwa dokumen Renstra merupakan penjabaran dari dokumen RPD. Dengan Demikian seluruh tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam Renstra mengacu pada RPD. Cascading kinerja RPD dan Renstra dinas sebagai berikut:

Tujuan ke- 1 RPD: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sistem Ekonomi Kerakyatan dengan Indikator Angka Pertumbuhan Ekonomi.	
Sasaran ke- 1.1 RPD: Meningkatnya kontribusi sektor unggulan Kabupaten Magetan.	
Indikator RPD:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Tukar Petani (NTP)</li> <li>2. Persentase PDRB Sektor Pertanian.</li> </ol>	
Tujuan ke-1 Dinas: Meningkatkan PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	
Sasaran ke-1.1 Dinas: Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Indikator: Produksi komoditas pertanian
	1. Padi (kw)
	2. Jagung (kw)
	3. Pamelon (kw)
	4. Tebu (ton)
	5. Tembakau (kw)
	6. Jeruk Besar (kw)
	7. Kopi (kw)
	8. Wortel (kw)
	9. Kentang (kw)
10. Bawang merah (kw)	

Tujuan ke-2 Dinas: Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah.	
Sasaran ke-2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indikator: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sejalan dengan Rencana Pembangunan daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dan mengacu pada tugas dan fungsinya, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan akan mendukung terlaksananya Tujuan dan Sasaran Kabupaten Magetan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel T-C.25.**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-		
				1	2	3
1	Meningkatkan PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan		Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	2,00	2,05	2,10
		Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Produksi komoditas pertanian :			
			Padi (kw)	3.538.629	3.582.243	3.635.198
			Jagung (kw)	1.516.395	1.558.349	1.603.768
			Kedelai (kw)	6.617	6.797	6.989
			Tebu (ton)	368.500	385.250	402.000
			Tembakau (kw)	2.760	2.950	3.000
			Jeruk Besar (kw)	204.000	270.000	332.500
			Kopi (kw)	216.000	232.250	250.000
			Wortel (kw)	293.750	305.500	317.250
			Kentang (kw)	76.300	77.000	78.120
			Bawang Merah (kw)	293.750	305.500	317.250
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat di urusan pertanian (angka)	80,25	80,50	80,75
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat di urusan pertanian (angka)	80,25	80,50	80,75





## BAB 5

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan dapat dilihat tabel 5.1. dibawah.

Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kegiatan sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	1. Meningkatkan Luas Tanam	1. Meningkatkan pelayanan irigasi
			2. Meningkatkan Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2. Penerapan Teknologi Budidaya
				3. Peningkatan kualitas Penyuluh Pertanian Lapang (baik ASN maupun swadaya) yang berfungsi sebagai Fasilitator, innovator dan motivator petani
				4. Peningkatan keberdayaan petani melalui peningkatan SDM dan mendorong terbentuknya korporasi petani
				5. Mengintegrasikan sektor hulu dan hilir pertanian dengan

				6. peningkatan penanganan pasca panen dan pemasaran produk pertanian
			3. Mengembangkan destinasi pariwisata unggulan Daerah yang didukung oleh tripel agro (agrowisata, agroindustri dan agrobisnis)	7. Mengembangkan agrowisata buah, sayur dan bunga
			4. Pemberdayaan petani miskin/ buruh tani	8. Pembinaan dan pemberian sarana produksi pertanian/ perkebunan
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	5. Meminimalisir kesenjangan antara tingkat layanan di Dinas TPHP dengan harapan dan keinginan stakeholder	9. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan 10. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan



## **BAB 6**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

### **6.1. Rencana Program**

Penyusunan program pembangunan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Magetan untuk tahun 2024 – 2026 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Dari sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Magetan Tahun 2024-2026 tersebut dijabarkan dalam program-program sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
5. Program penyuluhan pertanian

Program-program tersebut diterapkan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan dengan mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan.

### **6.2. Rencana Kegiatan**

Untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah disampaikan pada bab 2, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan melaksanakan kegiatan sebagai berikut.

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
  - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - d. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
    - a. Pengawasan penggunaan sarana pertanian
      - Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas teknologi dan spesifik lokasi
      - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
    - b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
      - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
      - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
  3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian

- a. Pengembangan Prasarana Pertanian
  - Pengelolaan LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
  - Koordinasi dan sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- b. Pembangunan Prasarana Pertanian
  - Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
  - Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
  - a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
    - Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Hortikultura dan Perkebunan
5. Program penyuluhan pertanian
  - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
    - Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa
    - Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa

Tolok ukur kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan selama periode waktu tahun 2024 – 2026 dijabarkan dalam tabel T-C.27. berikut.

Tabel T-C.27.

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Su b kegiatan	Indikator tujuan sasaran program kegiatan sub kegiatan (output)	Baseline 2023	2024		2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggun gjawab	lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kegiatan sektor pertanian	Meningkatnya produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Provitasi padi    (kw/ha)		64,32	4.750.000.000	64,81	4.750.000.000	65,52	4.750.000.000	65,52	1.425.000.000	DINAS TPHP	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah diversifikasi produk pertanian    produk		2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	6	6.000.000.000	DINAS TPHP	
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi		5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	5	1.500.000.000	15	4.500.000.000	DINAS TPHP	

				dan Spesifik Lokasi    laporan										
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian    laporan	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000	DINAS TPHP	
			<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terkelolanya komoditas unggul di Magetan    komoditas</b>	<b>8</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>8</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>8</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>8</b>	<b>8.250.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian    VUB	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	DINAS TPHP	
			Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan /Tumbuhan    dokumen	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	3	3.600.000.000	DINAS TPHP	
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman    dokumen	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	2	1.500.000.000	6	4.500.000.000	DINAS TPHP	
			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Indeks pertanaman    angka</b>	<b>2,42</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>2,43</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>2,44</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>2,44</b>	<b>24.000.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	
			Pengembangan Prasarana Pertanian	<b>Persentase lahan yang terlayani pupuk bersubsidi    %</b>	<b>100</b>	<b>700.000.000</b>	<b>100</b>	<b>700.000.000</b>	<b>100</b>	<b>700.000.000</b>	<b>100</b>	<b>2.100.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	

			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan / KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan / LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (dokumen)		1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	3	600.000.000	DINAS TPHP	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya    laporan		13	500.000.000	13	500.000.000	13	500.000.000	39	1.500.000.000	DINAS TPHP	
			Pembangunan Prasarana Pertanian	<b>Penambahan luas areal yang terlayani irigasi    ha</b>		<b>700</b>	<b>7.300.000.000</b>	<b>800</b>	<b>7.300.000.000</b>	<b>900</b>	<b>7.300.000.000</b>	<b>900</b>	<b>21.900.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara    unit		53	3.000.000.000	53	3.000.000.000	53	3.000.000.000	159	9.000.000.000	DINAS TPHP	
			Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara    unit		66	3.400.000.000	66	3.400.000.000	66	3.400.000.000	198	10.200.000.000	DINAS TPHP	
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara    unit		2	900.000.000	2	900.000.000	2	900.000.000	2	2.700.000.000	DINAS TPHP	
			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Terkendalinya luas tanaman yang terserang OPT    %</b>		<b>&lt;2</b>	<b>100.000.000</b>	<b>&lt;2</b>	<b>100.000.000</b>	<b>&lt;2</b>	<b>100.000.000</b>	<b>&lt;2</b>	<b>300.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	

			<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlayannya laporan serangan organisme pengganggu tanaman    %</b>		100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	450.000.000	DINAS TPHP	
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan    hektar		150	100.000.000	150	100.000.000	150	100.000.000	150	300.000.000	DINAS TPHP	
			Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang tertangani    hektar		150	50.000.000	150	50.000.000	150	50.000.000	150	150.000.000	DINAS TPHP	
			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen kelas kelompoknya    lembaga</b>		<b>97</b>	<b>330.000.000</b>	<b>97</b>	<b>330.000.000</b>	<b>97</b>	<b>330.000.000</b>	<b>291</b>	<b>990.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	
			<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah penambahan kelembagaan petani yang sesuai dengan peraturan perundangan    lembaga</b>		<b>18</b>	<b>330.000.000</b>	<b>18</b>	<b>330.000.000</b>	<b>18</b>	<b>330.000.000</b>	<b>54</b>	<b>990.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	
			Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya    unit		18	270.000.000	18	270.000.000	18	270.000.000	18	810.000.000	DINAS TPHP	

			Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (unit)		1.134	60.000.000	1.134	60.000.000	1.134	60.000.000	1.1.34	180.000.000	DINAS TPHP	
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Kepuasan ASN TPHPKP terhadap Layanan Kesekretariatan TPHPKP    Indeks		<b>80,25</b>	<b>14.451.000.000</b>	<b>80,50</b>	<b>14.451.000.000</b>	<b>80,75</b>	<b>14.651.000.000</b>	<b>80,75</b>	<b>56.655.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	
			<b>Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu    Dokumen</b>		<b>9</b>	<b>50.000.000</b>	<b>9</b>	<b>50.000.000</b>	<b>9</b>	<b>50.000.000</b>	<b>9</b>	<b>150.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    laporan		9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	450.000.000	DINAS TPHP	
			<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah    %</b>		<b>80</b>	<b>12.410.000.000</b>	<b>80</b>	<b>12.410.000.000</b>	<b>80</b>	<b>12.410.000.000</b>	<b>76</b>	<b>37.230.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN    orang/bulan		131	12.410.000.000	131	12.410.000.000	131	12.410.000.000	76	37.230.000.000	DINAS TPHP	
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai Prosedur    Orang</b>		<b>10</b>	<b>100.000.000</b>	<b>10</b>	<b>100.000.000</b>	<b>10</b>	<b>100.000.000</b>	<b>30</b>	<b>300.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan		10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	30	300.000.000	DINAS TPHP	

				Pelatihan    Orang										
			<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah    Paket</b>		<b>100</b>	<b>216.000.000</b>	<b>100</b>	<b>216.000.000</b>	<b>100</b>	<b>216.000.000</b>	<b>100</b>	<b>648.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan    paket		1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	24.000.000	DINAS TPHP
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan    paket		1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	DINAS TPHP
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan    paket		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	DINAS TPHP
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan    paket		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	75.000.000	DINAS TPHP
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan    dokumen		1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	24.000.000	DINAS TPHP
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD    laporan		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000	DINAS TPHP

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    unit</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>200.000.000</b>	<b>6</b>	<b>200.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	
		Pengadaan kendaraan dinas atau operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disdiakan    unit	2	0	2	0	2	200.000.000	6	200.000.000	DINAS TPHP	
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    Laporan</b>	<b>100</b>	<b>1.180.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.180.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.180.000.000</b>	<b>100</b>	<b>3.540.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan    laporan	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	36	450.000.000	DINAS TPHP	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diediakan    laporan	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	3	90.000.000	DINAS TPHP	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan    laporan	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	1.000.000.000	36	3.000.000.000	DINAS TPHP	
		<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara    Unit</b>	<b>100</b>	<b>495.000.000</b>	<b>100</b>	<b>495.000.000</b>	<b>100</b>	<b>495.000.000</b>	<b>100</b>	<b>1.485.000.000</b>	<b>DINAS TPHP</b>	

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya    unit	5	30.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	5	90.000.000	DINAS TPHP	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya    unit	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	DINAS TPHP	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi    unit	5	400.000.000	5	400.000.000	5	400.000.000	5	1.200.000.000	DINAS TPHP	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi    unit	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	45.000.000	DINAS TPHP	
<b>TOTAL</b>														



## BAB 7

# KINERJA PENYELENGGARAAN

### 6.1. Rencana Program

Program pembangunan daerah yang tertera dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026 yang dijabarkan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian diindikasikan oleh suatu Indikator Kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Indikator kinerja dalam Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan alat ukur keberhasilan kinerja pembangunan daerah melalui pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Magetan pada kurun waktu 2024-2026.

Penetapan indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut:

1. Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan
2. Produksi komoditas pertanian

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian *output* dan *outcome* program Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode Rencana Strategis dapat dicapai.

Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan dapat dilihat pada Tabel Indikator Kinerja berikut.

**Tabel T-C.28.**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**  
**Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**  
**TAHUN 2024-2026**

NO	Aspek/Fokus / Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPD	Target RPD				Kondisi kinerja pada akhir periode RPD	Sumber Data
				2023	2024	2025	2026		
1	Persentase laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	%			2,00	2,05	2,10	2,10	BPS
	Produksi komoditas pertanian :								
2	Padi	Kw		3.976.534	3.538.629	3.582.243	3.635.198	3.635.198	Dinas TPHP
3	Jagung	Kw		1.142.180	1.516.395	1.558.349	1.603.768	1.603.768	Dinas TPHP
4	Kedelai	Kw		23.650	6.617	6.797	6.989	6.989	Dinas TPHP
5	Tebu	Ton		561.225	368.500	385.250	402.000	402.000	Dinas TPHP
6	Tembakau	Kw		2.568	2.760	2.950	3.000	3.000	Dinas TPHP
7	Jeruk Besar	Kw		263.098	204.000	270.000	332.500	332.500	Dinas TPHP
8	Kopi	kw		216.000	216.000	232.250	250.000	250.000	Dinas TPHP
9	Wortel	Kw			293.750	305.500	317.250	317.250	Dinas TPHP
10	Kentang	kw			76.300	77.000	78.120	78.120	Dinas TPHP
11	Bawang merah	kw			293.750	305.500	317.250	317.250	Dinas TPHP



## BAB 8

### PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2026 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan maupun tiga tahunan yang berorientasi produksi, produktifitas pertanian, terutama dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Dokumen Renstra ini, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan;
2. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam Dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026 dimana sasaran dan indikator kinerja yang tertuang didalam Renstra merupakan tindak lanjut dari sasaran dan indikator kinerja yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Daerah Magetan Tahun 2024-2026;

Kepala Dinas dan Staf karyawan yang berada di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan berkewajiban untuk melaksanakan segala hal yang tertuang didalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan.

Magetan, 2023  
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN  
KETAHANAN PANGAN



**Ir. USWATUL CHASANAH, MMA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660904 199602 2 001